

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Bab ini merupakan simpulan dari penelitian Skripsi berjudul “*Crisis Management Initiative* dalam Penyelesaian Konflik Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia (2005-2012)”. Kesimpulan ini merujuk kepada jawaban penelitian dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Terdapat empat hal yang dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain :

Pertama, latar belakang pembentukan GAM di Aceh. Peneliti menganalisis bahwa GAM terbentuk karena adanya ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, disini masyarakat Aceh kecewa dengan janji yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang tak kunjung terlaksana. GAM pertama kali dikenal pada tahun 1953, organisasi ini terbentuk karena kekecewaan rakyat Aceh terhadap Presiden Soekarno yang tidak menepati janjinya dalam mengabulkan permintaan rakyat Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam.

Cara yang tepat untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh adalah dengan pemberlakuan “Daerah Istimewa” dan mendapatkan otonomi khusus. Mengingat jasa dari rakyat Aceh dalam membantu pemerintah Indonesia untuk melawan musuh yang kembali datang yaitu Kolonial Belanda cukup besar, yaitu dengan melakukan pengumpulan sejumlah dana untuk diberikan kepada negara, lantas Presiden Soekarno memberikan julukan kepada daerah Aceh sebagai “daerah modal”. Presiden Soekarno pun menyanggupi keinginan rakyat Aceh untuk menjadikan Syariat Islam sebagai acuan dalam kehidupan masyarakatnya, beliau menyatakan kesanggupannya di depan Daud Beureuh, seorang ulama yang sangat disegani oleh rakyat Aceh.

Realisasi dari janji Presiden Soekarno tidak dilaksanakan, justru yang terjadi adalah kebalikan dari janji manis itu. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan sebuah sistem penyederhanaan administrasi pemerintahan pada tahun 1950 yang mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan status. Salah satu dari semua daerah yang statusnya turun yaitu Aceh, yang tadinya

Eka Auliana Pratiwi, 2019

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjabat sebagai Daerah Istimewa, setelah operasi penyederhanaan tersebut di mulai status Aceh pun berubah menjadi daerah keresidenan yang di kuasai oleh provinsi Sumatera Utara. Penghapusan hak istimewa ini sangat berdampak terhadap perekonomian dan sistem pemerintahan di Aceh, sehingga Aceh merasa dianak tirikan.

Daud Beureueh selaku pimpinan di Aceh ketika itu merasa malu dan sebagai langkah penebus rasa bersalahnya beliau melakukan perlawanan dengan memilih masuk hutan dan bergabung dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 20 September 1953. Maka dari itu, konflik pertama di Aceh ini bertujuan untuk memperoleh otonomi.

Selanjutnya, konflik kedua di Aceh adalah konflik yang terjadi karena faktor kekerasan di bidang HAM dan ekonomi, kali ini pemimpin gerakannya adalah Hasan Tiro. Hasan Tiro adalah putra Aceh yang menggagas untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia, alasannya adalah banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil di Aceh dan juga tingginya tingkat korupsi di pemerintah pusat yang berdampak pada kurangnya distribusi dana untuk provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia termasuk Aceh. Menurut Hasan Tiro, solusi yang tepat adalah dengan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan tidak tergantung kepada Pemerintah Indonesia.

Hasan Tiro juga meyakini bahwa Aceh mampu mengalami kejayaan kembali seperti kejayaan masa lalu, yaitu seperti kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Kesultanan Aceh. Selanjutnya, Hasan Tiro membentuk sebuah organisasi untuk mewujudkan visinya dengan sebutan GAM dan dibentuk pada 4 Desember 1976 di pedalaman Tiro, Pidie. Hal ini selanjutnya menandai babak baru pemberontakan di Aceh. Perbedaan kedua ini bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan.

Kedua, latar belakang dipilihnya CMI sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Peneliti dapat menganalisis alasan CMI dipilih sebagai mediator karena CMI merupakan organisasi non-pemerintahan yang berpusat di Finlandia, tepatnya di Kota Helsinki dan bergerak di bidang resolusi konflik dan serta berpengalaman sejak tahun 2000. CMI sudah pernah menangani beberapa kasus konflik yang ada di beberapa negara seperti di Afrika Selatan, Afrika Barat, Liberia, Timur Tengah, Afganistan dan lain-lain.

CMI diketuai oleh seorang mantan Presiden Finlandia yang bernama Martti Ahtisaari. Beliau merupakan sosok yang sangat dikenal di kalangan negara-negara Uni Eropa, *track record* Martti Ahtisaari tidak perlu diragukan lagi dalam hal mediasi. Kedekatannya dengan Uni Eropa memudahkannya dalam mengusulkan bantuan dana dalam pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berjalan secara berkelanjutan hingga konflik di suatu negara dapat teratasi.

CMI dianggap relevan untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia. Selain dari *track record* nya yang sudah panjang, letak geografis Helsinki juga sangat berdekatan dengan Swedia. Swedia adalah negara tempat para petinggi-petinggi GAM yang mendapat suaka politik di luar negeri. Hal ini tentunya memudahkan para petinggi-petinggi GAM untuk menghadiri diskusi untuk mencapai kesepakatan damai.

Ketiga, Proses perundingan damai. Diskusi yang dilakukan oleh semua pihak dilakukan sebanyak 13 kali pertemuan dengan 5 kali putaran. Pertama kali diskusi dimulai pada bulan Januari 2005 dan berlanjut hingga Agustus 2005, selama proses perundingan, baik pihak GAM maupun Pemerintah Indonesia saling memberikan tawaran-tawarannya dan didiskusikan secara bersama. Pada putaran ketiga, sempat terjadi ketegangan akibat adanya ketidak samaan keinginan antar pihak yang bertikai. Namun, CMI tetap berusaha agar perundingan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, langkah yang dibuat CMI selanjutnya adalah dengan memberikan fasilitas penasehat profesional kepada pihak yang bertikai untuk mencari titik temu permasalahan. Akhirnya perundingan pun sukses dilaksanakan dan hingga para pihak yang bertikai melakukan penandatanganan perjanjian damai atau yang lebih dikenal sebagai MoU Helsinki.

Keempat, dampak dari perjanjian damai di Aceh adalah adanya kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat sipil bisa kembali bekerja, para kombatan GAM turun gunung dan kembali ke keluarga masing-masing, gencatan senjata mulai berkurang dan kehidupan masyarakat di Aceh perlahan menjadi lebih baik. Meskipun memang di masa transisi menuju perdamaian masih terdapat gencatan senjata dan tindak kekerasan, tetapi makin lama makin berkurang. Selain itu, juga berpengaruh terhadap pendistribusian bantuan untuk korban Tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Sebelumnya para relawan khawatir ketika bertugas di wilayah konflik dan pemberian

bantuan pun sempat tersendat, setelah adanya perjanjian damai, relawan datang dalam jumlah yang lebih banyak lagi dan bantuan lainnya yang datang ke Aceh sangat berlimpah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dampak lainnya adalah adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami, yaitu dengan pemberian dana pendidikan, kesehatan dan pekerjaan bagi para mantan kombatan GAM. CMI masih memantau perkembangan pelaksanaan perjanjian damai di Aceh, harusnya kontrak dengan CMI berakhir pada tahun 2009, namun dengan beberapa pertimbangan kontrak dengan CMI diperpanjang untuk memantau implementasi dari MoU helsinki. Pada tahun 2012, kontrak dengan CMI resmi berakhir dan diharapkan konflik yang terjadi di Aceh ini juga benar-benar berakhir.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada pembelajaran Sejarah Indonesia Wajib pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dikarenakan kajian yang dibahas di dalam skripsi ini berhubungan dengan materi pembelajaran sejarah Indonesia wajib di sekolah Kelas XII yang meliputi Kompetensi Inti (KI): Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Dengan Kompetensi dasar (KD) : Merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI) dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.

Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, baik para akademisi maupun khalayak umum mengenai ancaman disintegrasi di Indonesia khususnya perihal konflik Aceh. Selanjutnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi dasar atau referensi untuk penelitian lainnya mengenai ancaman disintegrasi di Indonesia. Dalam skripsi ini terdapat beberapa kajian mendalam mengenai peran CMI sebagai mediator konflik. Namun dalam penelitian ini terdapat kajian yang tidak dikaji secara mendalam seperti peranan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik Aceh.

Eka Auliana Pratiwi, 2019

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu